

Article

Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kecamatan Benakat Kabupaten Muaraenim

Dita Mayreista^{1*}, Eka Nurwahyuliningsih², Mutiara Rizki³

^{1,2,3}STISIPOL Candradimuka

* Correspondensi Penulis: dita.mayreista@stisipolcandradimuka.ac.id

Abstract: *This study aims to describe the results of the evaluation of the implementation of the BLT-DD program in Betung Village and its impact on the local community by focusing on the four CIPP evaluation approaches (Context, Input, Process and Product). Using a qualitative research method with a descriptive approach, with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation studies. Data analysis techniques use condensation, data presentation, describing and drawing conclusions. Informants in this study were taken using purposive sampling technique, namely someone who can provide information according to research needs, while the informants consisted of 8 (eight) people including the Village Head 1 person, Chairman of the BPD (Village Consultative Body) 1 person, Village Secretary 1 person, Kaur Keungan Village 1 person, People who received assistance 2 people, and People who did not receive assistance 2 people. The research location was in Betung Village, Benakat Sub-district, Muara Enim Regency. The findings in this study show that the implementation of the BLT-DD program in Betung Village has been carried out effectively in accordance with the evaluation through context, input, process, and product evaluation indicators. The BLT-DD program in Betung Village has provided significant benefits to the community affected by the pandemic, but there are still some improvements needed in several aspects, including updating beneficiary data, increasing supervision of the program, and it is hoped that in the future the BLT-DD program will be integrated with community economic empowerment programs.*

Keywords: *Social Protection, Village Fund Cash Assistance, Community Welfare*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan program BLT-DD di Desa Betung dan dampaknya terhadap masyarakat setempat dengan fokus pada empat pendekatan evaluasi CIPP (Context, Input, Process dan Product). Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan kondensasi, penyajian data, menggambarkan dan menarik kesimpulan. Informan dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik purposive sampling yakni seseorang yang dapat memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian, adapun informan terdiri dari 8 (Delapan) orang diantaranya Kepala Desa 1 orang, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 1 orang, Sekretaris Desa 1 orang, Kaur Keungan Desa 1 orang, Masyarakat yang menerima bantuan 2 orang, dan Masyarakat yang tidak menerima bantuan 2 orang. Lokus penelitian berada di Desa Betung Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program BLT-DD di Desa Betung telah dilakukan dengan efektif sesuai dengan evaluasi melalui indikator context, input, process, dan product evaluasi. Program BLT-DD di Desa Betung memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi masyarakat yang terdampak pandemi, akan tetapi masih perlu beberapa perbaikan pada beberapa aspek diantaranya pemuktahiran data penerima manfaat, peningkatan pengawasan terhadap program serta diharapkan di masa mendatang program BLT-DD telah terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Sosial, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Lambi,

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak terhadap sektor kesehatan melainkan juga pada sektor sosial, ekonomi, dan lainnya. Imbas adanya wabah tersebut menggerakkan pemerintah memberikan perhatiannya kepada masyarakat melalui pendistribusian bantuan sosial berupa pemenuhan kebutuhan pokok dan pemberian uang tunai (Herdiana et al., 2021). Salah satu program tersebut ialah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam penanggulangan dampak COVID-19, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, juga melalui Instruksi Menteri Desa PDT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, (2020) Dana Desa merupakan disediakan untuk anggaran *on budget* yang dapat digunakan langsung mendukung berbagai upaya dalam mengurangi dampak dari COVID-19 baik ditingkat rumah tangga maupun desa. Program ini seharusnya mampu mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan program jaring pengaman sosial (Sofi, 2021).

Penetapan sasaran penerima manfaat dalam program sosial menjadi hal yang krusial, artinya perlu perhatian khusus dari pemerintah dalam memetakan jumlah penerima manfaat, kriteria target prioritas penerima BLT- DD. Pemberian program ini ditujukan kepada keluarga miskin dan rentan yang telah memenuhi semua kriteria diantaranya masyarakat yang belum menerima program PKH, BPNT, dan Kartu Prakerja (Kementerian Desa, 2020). Berkenan dengan penepatan penerima manfaat dilakukan dengan menggunakan pendekatan musyawarah atau gotong royong, hal ini agar tidak menimbulkan salah target dan kecemburuan sosial terhadap sasaran dalam penyaluran program bantuan. Program BLT-DD adalah salah satu langkah untuk mengurangi kemiskinan dengan tujuan membantu masyarakat mencapai kesejahteraan, hal ini diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar secara memadai serta meningkatkan kualitas hidup baik untuk diri sendiri maupun anggota keluarga (Adhania et al., 2023).

Menurut hemat Kurniawan, (2020) terdapat tiga faktor pendukung keberhasilan program BLT Dana Desa diantaranya 1). Kesiapan lembaga dan komitmen para aktor pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam proses pendataan calon penerima manfaat; 2). Kriteria calon penerima bantuan yang digunakan oleh desa tidaklah rumit, artinya desa memiliki keleluasan dalam memilih komponen calon penerima manfaat; 3). Melibatkan masyarakat dalam menentukan calon penerima manfaat melalui kegiatan musyawarah bersama agar adanya transparansi serta akuntabilitas sehingga hasil dapat diterima oleh semua pihak. Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan, (2022) menjelaskan bahwa kebijakan tersebut memberikan fleksibilitas untuk memprioritaskan penanganan kemiskinan melalui pemberian program BLT-DD. Alokasi anggaran yang berbeda dari setiap kementerian, transparansi masalah data penerima manfaat yang belum terintegrasi dengan baik, dan sistem penyaluran bantuan acap kali menjadi permasalahan yang muncul dari program BLT-DD (Aseh et al., 2021). Lebih lanjut karena alokasi dana desa ditentukan berdasarkan desa bukan kecamatan atau kabupaten maka beresiko menimbulkan potensi hal-hal yang tidak diinginkan.

Angka kemiskinan di Indonesia didominasi oleh penduduk yang tinggal di desa, sebagaimana data yang diperoleh dari TNP2K tahun 2020 memaparkan terdapat sekitar 25,1 juta

penduduk miskin pada 2019, sebanyak 85,40% (persen) diantaranya berada di wilayah administrasi desa. Total dana desa yang dialihkan menjadi bantuan langsung tunai mencapai Rp. 24,47 triliun atau sekitar 20-30% (persen) dari total anggaran dana desa yang telah dialokasikan pemerintah dalam APBN Tahun 2020 sebesar Rp. 72 triliun. Penerapan BLT-DD setidaknya diterapkan selama enam bulan dengan target utamanya yakni rumah tangga dengan nominal setiap bulan diterima sebesar Rp. 600.000 dan Diberikan selama tiga bulan dan Rp. 300.000 untuk tiga bulan berikutnya (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2020).

Terdapat berbagai penelitian terdahulu mengenai BLT-DD. Kajian tersebut dikelompokkan berdasarkan fokus kajian yakni implementasi dan efektivitas program BLT-DD, pengaruh program BLT-DD terhadap kesejahteraan masyarakat, dan problematika penyaluran bantuan. Adapun hasil penelitian mengenai implementasi dan efektivitas program BLT dilakukan oleh (Maryam & Cahyani, 2022); (Herdiana et al., 2021); (Arumdani et al., 2021); (Ulumudin et al., 2022); (Subhan et al., 2023); (Achmad W, 2024). Lebih lanjut hasil telaah dari Maspawati et al., (2023) yakni terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara BLT Dana Desa dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu amatan yang dilakukan oleh Aseh et al., (2021); Hadi, N., et al., (2025) berbagai polemik yang ditemukan dalam implementasi diantaranya kejelasan isi kebijakan yang masih rancu, ketidakjelasan regulasi, dan berkaitan dengan teknis pencairan bantuan.

Penelitian ini berbeda dengan kajian terdahulu karena lebih fokus pada evaluasi program BLT-DD. Sebagaimana penelitian dilakukan di Desa Betung Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa ditemukan berbagai hambatan dalam pelaksanaan program tersebut. Dengan Demikian, penelitian ini melakukan evaluasi terhadap program BLT-DD dengan *tools* analisa teori evaluasi yang dikemukakan oleh Stufflebeam, D.L. & Shinkfield, A.J. (1985) dikenal dengan CIPP yaitu evaluasi konteks (*context evaluation*); evaluasi masukan (*input evaluation*); evaluasi proses (*proses evaluation*); dan evaluasi produk (*product evaluation*). Sebagaimana dijelaskan oleh Suharto, E (2013) secara umum evaluasi dilakukan untuk mengetahui hal-hal seperti mengkaji seberapa besar sebuah program atau kebijakan dapat mencapai tujuannya; memberi panduan kepada para pelaksana kebijakan mengenai seberapa lancar proses kebijakan tersebut diimplementasikan; dan menyediakan indikator penting bagi pembuat kebijakan di masa mendatang. Adapun tujuan penelitian ialah untuk mengevaluasi pelaksanaan program BLT-DD di Desa Betung dan dampaknya terhadap masyarakat setempat dengan fokus pada empat indikator CIPP.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Perlindungan Sosial

International Labour Organization (ILO) memaparkan perlindungan sosial adalah bagian dari kebijakan sosial yang telah dirancang untuk menjamin kondisi keamanan terhadap pendapatan dan akses dalam menerima layanan sosial bagi semua kalangan, dengan tetap berfokus terhadap kelompok rentan (Habibullah, 2017). Pada dasarnya perlindungan sosial merupakan sekumpulan kebijakan dan program yang dirancang agar dapat menurunkan angka kemiskinan dan kerentanan melalui berbagai strategi diantaranya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk (Asian Development Bank, 2021). ADB membagi perlindungan sosial kedalam beberapa indikator diantaranya *sosial assistance* (bantuan sosial); *sosial insurance* (asuransi sosial); *labor market program* (pasar tenaga kerja). Sistem perlindungan sosial di Indonesia terdiri dari skema iuran yakni program asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan, skema non iuran yakni program bantuan sosial yang dibiayai oleh pemerintah

melalui penerimaan pajak umum, serta program perlindungan sosial adaptif.

Perlindungan sosial sangat erat korelasinya dengan memperoleh pekerjaan yang layak untuk semua orang, untuk memerangi angka kemiskinan, ketertinggalan, dan ketidaksetaraan. Artinya dalam impelentasinya, perlindungan sosial tidak bisa bekerja sendiri jika untuk mengurangi angka kemiskinan melainkan perlu strategi yang efektif (Habibullah, 2017). Program perlindungan sosial yang berjalan dengan baik dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pentingnya perlindungan sosial juga tercermin dalam kebijakan pemerintah melalui program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), di mana salah satu komponen utamanya adalah program perlindungan sosial sebagai bagian dari kebijakan komprehensif untuk melindungi kehidupan perekonomian. Sebagaimana saat pandemic COVID-19, program perlindungan sosial memiliki peran vital dalam mempertahankan tingkat konsumsi, terutama bagi masyarakat yang memiliki tingkat penghasilan rendah (Rizki, 2021).

Word Bank mendukung pelaksanaan perlindungan sosial dengan tiga tujuan utama yaitu 1). Keadilan (*Equity*) artinya mengurangi kemiskinaan dan ketidaksetaraan, mendorong kesetaraan, dan mengatasi pengucilan terutama bagi kelompok rentan termasuk perempuan dan anak; 2). Kesempatan (*Opportunity*), dimaknai dengan berinvestasi dalam kapasitas Manusia dan oangan serta gizi, meningkatkan akses terhadap pekerjaan yang produktif, membangun keterampilan untuk bekerja; 3). Ketahanan (*Resilience*) artinya memberikan perlindungan dan asuransi terhadap guncangan dan membangun kapasitas untuk mengelolanya termasuk terhadap bencana alam, pandemi, perubahan iklim, krisis ekonomi dan keuangan, konflik atau pengusi, dan lainnya.

Menurut Suharto, (2013) kebijakan dan program perlindungan sosial di Indonesia mencakup tiga komponen diantaranya 1). Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk program jaminan sosial yang berupa tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada kelompok rentan; 2). Asuransi sosial merupakan skema jaminan sosial terdiri dari asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, asuransi kecelakaan kerja, asuransi hari tua (pensiun), dan lainnya; 3). Jaminan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (*community-based social welfare security*) atau jamkesos yang diarahkan untuk mengatasi kerentanan pada tingkat komunitas.

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan sosial berupa bantuan langsung tunai. Menurut Sofi, (2021) adapun dukungan tersebut diberikan oleh Kementerian Desa yang diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020 sebagai perbaikan dari Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Lebih lanjut bantuan langsung tunai merupakan kegiatan untuk menerapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 104 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022. Dipaparkan bahwa dana yang digunakan untuk anggaran desa dibagi menjadi empat, yakni 1). Program perlindungan sosial berupa batuan langsung dari dana desa sekurang-kurangnya 40%; 2). Program keamanan pangan dan hewan minimal yaitu 20%; 3). Bantuan keuangan untuk penanggulangan penyakit akibat wabah virus corona minimal 8% dari dana desa; 4). Program prioritas sektor lainnya (Triana et al., 2023).

Berdasarkan hasil laporan yang dipaparkan oleh SMERU Research Intitute bahwa dalam terdapat dua pelajaran penting yang diperoleh oleh pemerintah desa terkait kapasitas yang dimiliki oleh desa dalam pelaksanaan BLT-DD diantaranya 1). Desa memiliki kemampuan untuk melakukan pendataan serta memperbaharui data keluarga miskin; 2). Desa mampu menyalurkan bantuan sosial kepada warganya, artinya kemampuan ini dipengaruhi oleh implementasi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam lima tahun terakhir (Kurniawan, 2020); (Isma, A. Y., et. al. (2025)).

Program BLT-DD berbeda dengan program bantuan sosial lainnya, hal ini terlihat dari skema yang diberikan dan kriteria calon penerima manfaat bantuan. Berdasarkan Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Juni tahun 2020 oleh Kementerian Desa, (2020) adapun kriteria calon penerima bantuan adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata akan tetapi memenuhi kriteria Berikut:

1. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja;
2. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis;

Adapun besaran bantuan yang diberikan dari BLT-DD yakni Rp. 600.000 untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi syarat dan diberikan untuk selama 3 (tiga) bulan, kemudian tiga bulan berikutnya akan diberikan sebesar Rp. 300.000 (Triana et al., 2023). Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada beberapa prinsip, diantaranya:

1. Keadilan yakni mengutamakan kepentingan dan hak seluruh warga desa tanpa terkecuali;
2. Kebutuhan kepentingan prioritas dengan mendahulukan desa yang lebih mendesak dan berhubungan dengan kepentingan sebagian masyarakat;
3. Kewenangan desa artinya mengutamakan kewenangan lokal yang berskala desa serta hak asal-usul;
4. Partisipatif yakni mengutamakan kreatifitas masyarakat desa;
5. Swasekola dan berbasis sumber daya desa yakni mengutamakan pendayagunaan sumber daya alam desa dan dan pelaksanaan secara mandiri dengan mengutamakan pikiran, tenaga, dan keterampilan warga desa serta memanfaatkan kearifan lokal;
6. Tipologi desa artinya mempertimbangkan kondisi geografis, antropologis, sosiologis, ekonomi dan ekologi desa.

Evaluasi Model CIIP (*Context, Input, Proses, Product*)

Menurut Suharto, (2013) Evaluasi merupakan tahap akhir dari sebuah proses pembuatan kebijakan. Kendati demikian, dari evaluasi yang dilakukan menghasilkan masukan-masukan guna penyempurnaan kebijakan atau atau perumusan kebijakan selanjutnya. Umumnya, evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui berbagai hal-hal seperti 1). Mengkaji seberapa besar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan-tujuannya; 2). Memberi panduan kepada para pelaksana kebijakan mengenai seberapa lancar proses kebijakan tersebut diimplementasikan; 3). Menyediakan indikator penting bagi pembuat kebijakan di masa mendatang. Sebagaimana penelitian ini menggunakan *tools* analisa evaluasi model *context, input, process, product* (CIPP) yang dikembangkan oleh Stufflebeam, D.L., & Shinkfield, A.J. (1985), berikut di bawah ini penjelasan secara detail.

1. Context Evaluation

Indikator pertama berkaitan dengan penyediaan informasi untuk menetapkan tujuan yang baik, merumuskan lingkungan yang relevan serta mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan program atau kegiatan. Evaluasi konteks dimaksudkan untuk menyediakan informasi guna merumuskan "*goal and objectives*". Adapun tujuannya untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh evaluasi.

2. Input Evaluation

Evaluasi masukan membantu dalam mengatur keputusan, menentukan sumber yang ada, alternative apa yang dapat diambil, rencana dan strategi untuk mencapai tujuan serta

bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Sederhana nya, indikator ini menjelaskan mengenai bahan-bahan dan sumber daya yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan.

3. *Process Evaluation*

Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang terjadi. Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program.

4. *Product Evaluation*

Evaluasi produk dilakukan pada akhir suatu program atau kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, berdasarkan standar dan kriteria tertentu. Tipe evaluasi yang digunakan tergantung pada tujuan yang ingin diukur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono, (2022) penelitian deskriptif kualitatif ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Penelitian ini fokus pada Evaluasi dari pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan menggunakan alat analisa CIPP terdiri dari 4 (empat) dimensi diantaranya *Context Evaluasi; Input Evaluasi; Process Evaluasi* dan *Product Evaluasi*.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sumber data dalam penelitian menggunakan data primer yakni data yang diperoleh di lokasi penelitian meliputi identitas informan, data hasil wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder yakni data pendukung diantaranya sumber referensi yang mendukung penelitian dan penulisan laporan yang diperoleh dari data jumlah penduduk dan struktur organisasi desa, luas wilayah, status dan letak geografis desa, buku, artikel ilmiah yang diakses melalui data base rumah jurnal seperti google scholar, research gate, dan lainnya. Teknik analisa data menggunakan 1). Kondensasi data merupakan proses pemilihan, fokus, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan data temuan lainnya, hal tersebut dilakukan untuk memperkuat hasil temuan penelitian yang telah dianalisa sehingga dapat disimpulkan; 2). Penyajian data (*display data*) yakni Penyajian data adalah kumpulan data atau informasi terorganisir yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan; 3). Menggambarkan dan Menarik Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusion*) yakni data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian ditarik kesimpulan dan dilakukan verifikasi, adapun kesimpulan yang diambil bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal sehingga kesimpulan disajikan dalam bentuk deskripsi berdasarkan hasil temuan lapangan.

Lokus penelitian di Desa Betung. Desa tersebut berada pada salah satu wilayah administrative yang terletak di Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Memiliki wilayah yang cukup luas dan mempunyai sumber daya alam yang melimpah dengan sebagian besar wilayahnya dilintasi oleh aliran sungai. Adapun Desa Betung terdiri atas 6 (enam) dusun yang dipimpin oleh kepala dusun. Berikut merupakan peta Desa Betung.

Gambar 1. Peta Wilayah Desa Betung



Sumber: Buku Desa

Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* artinya informan merupakan seseorang yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan peranan yang telah diberikan. Menurut Moleng, (2018) Informan tidak hanya meberikan keterangan tentang sesuatu kepada peneliti melainkan juga memberikan saran tentang sumber bukti dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Berikut di bawah ini merupakan informan penelitian yang dijelaskan dalam tabel.

Tabel 1. Informan Peneltian

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa Betung	1 orang
2	Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa)	1 orang
3	Sekretasi Desa 2023	1 orang
4	Kaur Keuangan Desa	1 orang
5	Masyarakat yang menerima bantuan	2 orang
6	Masyarakat yang tidak menerima bantuan	2 orang
Total		8 orang

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin ataupun tidak mampu di desa dengan sumber dana anggaran berasal dari dana desa, hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak ekonomi pasca terjadinya pandemic COVID-19. Penentuan penggunaan dana desa patut mempertimbangkan aspek manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan empat dimensi 1). *Context evaluation* berkenaan dengan tujuan dan hambatan program BLT-DD; 2). *Input evaluation* indikatornya terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana program; 3). *Process evaluation* meliputi program bantuan langsung tunai dana desa yang telah diterapkan; 4). *Product evaluation* berkenaan dengan hasil dari program BLT-DD yang telah diimplementasikan. Keempat dimensi tersebut memberikan kerangka komprehensif untuk menilai keberhasilan sebuah program.

1. *Context evaluation*

Evaluasi konteks berhubungan dengan tujuan program BLT-DD yakni memberikan bantuan langsung kepada masyarakat desa yang terdampak wabah Covid-19 untuk pemulihan aktivitas ekonomi dan membantu keberlangsungan kegiatan di desa. Dimensi ini berfokus pada kesesuaian tujuan dengan implementasi di lapangan serta hambatan yang dialami. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa informan, Program BLT-DD telah ada sejak lama dan semenjak tahun 2020 program tersebut diperuntukkan kepada masyarakat desa yang terkena dampak Covid-19 (seperti masyarakat miskin, lansia, dan masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan). Akan tetapi, setelah masa peralihan *new normal* (era baru), bantuan BLT-DD dialokasikan kepada masyarakat kurang mampu. Hal ini tentu sesuai dengan tujuan program yakni mengurangi angka kemiskinan di Desa, sebagaimana program BLT-DD sumber dana dianggarkan dari dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri Keuangan. BLT-DD merupakan program jaring pengaman sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat, bantuan Diberikan secara langsung kepada masyarakat Desa Betung dengan pengawasan dari aparat desa.

Proses penyaluran bantuan tidak serta merta berjalan secara efektif dan efisien, dalam pelaksanaan program BLT DD sring kali menghadapi berbagai hambatan baik teknis maupun non teknis, sebagaimana dalam sebuah kebijakan hambatan menjadi masalah yang menjadi salah satu kelemahan penerapan program. Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa hambatan tersebut dibagi menjadi dua yakni 1). Hambatan teknis berkaitan dengan data penerima manfaat (PM) yang tidak akurat artinya terdapat ketidaksesuaian data PM yang sering menjadi kendala dan menimbulkan kecemburuan sosial dengan sesama masyarakat di lingkungan tersebut. Hambatan teknis lainnya berhubungan dengan keterlambatan dalam pencairan dana meskipun tidak kerap terjadi. 2). Hambatan Kebijakan dan regulasi yang berubah artinya perubahan regulasi yang terjadi membuat bingung perangkat desa dalam pelaksanaan program.

2. *Input evaluation*

Dimensi ini fokus terhadap membantu mengatur keputusan, menentukan sumber yang ada, rencana dan strategi untuk mencapai tujuan serta bagaimana prosedur kerja untuk mencapai hal tersebut. Adapun komponen pada dimensi ini meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung serta anggaran dana program BLT-DD. 1). Sumber daya manusia menjadi aspek yang cukup signifikan dalam keberlangsungan sebuah program. SDM ini berkaitan dengan perangkat desa serta penerima manfaat (PM). Berkenaan dengan SDM perangkat desa, pada awal implementasi program masih terdapat kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi perangkat desa dalam mengelola penyaluran BLT-DD, namun hal ini sudah teratasi dengan baik seiring berjalannya waktu. Sedangkan SDM PM, masyarakat sangat antusias dalam program BLT-DD karena program ini memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat desa saat pandemic Covid-19 sampai saat ini. 2). Sarana dan prasarana menjadi salah satu perangkat yang mendukung pelaksanaan dari sebuah kebijakan hal ini demi kelancaran program. berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, bahwa sarana dan prasarana yang memadai sangat penting mendukung keberlangsungan program BLT-DD seperti sistem administrasi dan teknologi informasi yang memadai untuk mendata jumlah penerima manfaat program secara akurat serta mencegah adanya penerima ganda, terdapat laptop dan perangkat lainnya yang mendukung untuk pelaporan program, jaringan internet yang cukup stabil di Desa Betung, kantor desa yang memadai sebagai tempat penyaluran bantuan, terdapat transportasi yang memadai dalam penyaluran bantuan ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, perlengkapan alat tulis dan dokumentasi sudah lengkap. 3). Dana

program, berkaitan dengan hasil wawancara menunjukkan bahwa anggaran BLT-DD yang diterima oleh PM dalam waktu tiga bulan sekali sebesar Rp. 900.000.

3. *Process evaluation*

Evaluasi proses dalam model CIPP menunjuk pada 3 (tiga) W yakni *what*, *who*, dan *when*. Apa (*what*) kegiatan yang dilakukan dalam program, siapa (*who*) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program dan penerima manfaat program, kapan (*when*) kegiatan akan selesai. Adapun indikator pada dimensi ini meliputi 1). Waktu dan sasaran menjadi bagian dari perjalanan dalam pelaksanaan sebuah program dan sasaran adalah target program yang diterapkan sehingga tujuan dari program dapat dilaksanakan secara maksimal. Berdasarkan hasil wawancara mengungkapkan bahwa pelaksanaan program BLT-DD sudah dilakukan dengan tepat waktu, akan tetapi berkaitan dengan penerima manfaat masih terdapat ketidaksesuaian PM dari program BLT-DD. 2). Pengawasan dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah Kabupaten/Kota. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa program diimplementasikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan minim kecurangan ataupun penggelapan serta penyalagunaan dana.

4. *Product evaluation*

Evaluasi akhir dari suatu program kegiatan. Evaluasi produk untuk mengukur pencapaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun indikator dalam dimensi ini meliputi dampak dan produk (Ami, et al, (2021)), 1). Dampak merupakan pengaruh yang akan terjadi di masa depan baik dampak positif maupun negatif. Tentunya dampak ini berhubungan dengan kebijakan program BLT-DD memberikan dampak baik bagi ekonomi desa serta menjadi jawaban atas permasalahan kemiskinan di desa yang disebabkan oleh wabah pandemi Covid-19 atau sebaliknya. Hasil penelitian mengatakan bahwa program BLT-DD memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat Desa Betung, sehingga dengan adanya bantuan tersebut masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokok. 2). Produk yakni sebagaimana dalam suatu kebijakan produk tersebut sudah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, atau perlu dikaji ulang. Merujuk pada hasil penelitian bahwa program BLT-DD perlu untuk dilakukan tinjauan ulang dan melihat fungsi dari program tersebut agar lebih efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pembahasan

Evaluasi program BLT-DD di Desa Betung menggunakan pendekatan CIPP (*Context evaluation, input evaluation, process evaluation, dan product evaluation*) yang dikemukakan oleh Stufflebeam bertujuan untuk dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai efektivitas program tersebut. Model CIPP menjadi salah satu model evaluasi yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi suatu program atau sistem dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti biaya dan manfaat yang diberikan (Elmanda, et al., 2022) dalam Rama, et al., (2023).

Program BLT-DD penting karena memberikan dukungan secara langsung kepada masyarakat desa yang mungkin sulit memperoleh akses bantuan lainnya. Selama pandemi Covid-19, Desa Betung mengalokasikan sebagian besar dana desa untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dan prioritas penerima manfaatnya adalah warga yang terdampak langsung dari pembatasan ekonomi akibat pandemi seperti halnya pedagang kecil, buruh harian, petani, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan terkena PHK. Adanya program BLT-DD memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat salah satunya membantu masyarakat Desa Betung memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan dan kesehatan. Setelah pandemi Covid-19 fokus bantuan menjadi berubah yakni sebagai alat pendukung untuk kelompok miskin atau masyarakat

yang belum pulih secara ekonomi.

Context evaluation berkaitan dengan tujuan program dan kebijakan program BLT-DD. Tujuan dari evaluasi konteks adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang komponen tujuan dan hambatan yang dihadapi, yang mana elemen tersebut mempengaruhi pelaksanaan program. Adapun dalam implementasi telah sesuai dengan tujuan program BLT-DD, serta masih ditemukan berbagai hambatan dalam distribusi penyaluran sehingga menyebabkan bantuan tidak begitu optimal, namun hal ini telah diatasi oleh perangkat desa.

Input evaluation merujuk pada sumber daya yang dimanfaatkan dalam keberlangsungan suatu program. Sumber daya tersebut dinyatakan telah memadai untuk mencapai tujuan program serta mengamati apakah penggunaannya telah dilakukan secara efisien. Sebagaimana pada program BLT-DD yang telah dilaksanakan di Desa Betung mulai dari sumber daya manusia yakni perangkat desa yang sudah terlatih dalam penyaluran bantuan dan masyarakat desa penerima manfaat yang antusias dalam program ini karena program tersebut memberikan banyak dampak positif terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat. Selain itu sarana dan prasarana yang mumpuni menjadi aspek penting dalam mendukung keberlanjutan program. Berikutnya dana anggaran yang disalurkan sudah sesuai dengan angka yang diberikan dan diberikan kepada masyarakat yang telah terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), dengan dana tersebut memberikan perubahan kondisi ekonomi masyarakat yakni perlahan mampu meningkatkan penghasilan melalui modal dari bantuan BLT-DD sehingga memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Process Evaluation bertujuan untuk menilai sejauh mana strategi dan kegiatan yang telah diterapkan ini berhasil dalam mendukung pencapaian tujuan program BLT-DD serta memastikan apakah terdapat interaksi positif antara personel dan peserta program. Selain itu, evaluasi proses berfungsi mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan hal ini baik berupa aktivitas, guna memahami sejauh mana rencana telah dilaksanakan serta menentukan komponen yang perlu diperbaiki (Bachtiar, (2021) dalam Rama et al., (2023)). Evaluasi ini mencakup beberapa aspek penting mulai dari waktu dan sasaran serta pengawasan. Berkaitan dengan waktu pelaksanaan telah sesuai dengan jadwal kegiatan program. Masing penerima manfaat memperoleh bantuan dalam 3 (tiga bulan sekali) dengan nominal bantuan sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu sasaran penerima program BLT-DD harus masuk dalam pangkalan DTKS, meskipun masih terdapat masyarakat yang belum terdata maka tetap layak menerima bantuan apabila sesuai dengan kriteria. Sekalipun di lapangan masih ditemui salah target sasaran, penerima manfaat, perbaikan data sangat diperlukan untuk memastikan keberlangsungan program tersebut. Aspek pengawasan menjadi hal yang krusial dalam implementasi program karena aktivitas ini untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan meminimalisir potensi kecurangan. Rekomendasi seperti meningkatkan pengawasan, meningkatkan transparansi distribusi, dan meningkatkan pendataan didasarkan pada hasil evaluasi ini.

Product evaluation pada program BLT-DD untuk menilai hasil dan dampak akhir dari program terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Betung. Menurut hemat Julianto & Fitriah, (2021) dalam Rama, et al., (2023) evaluasi produk bertujuan untuk mengevaluasi berkaitan dengan apakah program BLT-Dd telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan hasil yang dicapai telah sesuai dengan harapan. Indikator ini sangat menentukan keberlanjutan program di masa depan. Sebagaimana penelitian ini fokus terhadap dampak dari program BLT-DD serta produk kebijakan yang telah sesuai dengan direncanakan sebelumnya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan program ini layak untuk dilanjutkan karena memberikan berbagai dampak positif terhadap penerima manfaatnya seperti halnya program BLT-DD memberikan pengaruh langsung

yakni mampu memenuhi kebutuhan mendesak penerima manfaat, pengaruh jangka Panjang yakni meningkatkan Kemandirian ekonomi penerima manfaat di Desa Betung.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai evaluasi program BLT-DD di Desa Betung menggunakan pendekatan CIPP (*Context evaluation, input evaluation, process evaluation, product evaluation*) dapat disimpulkan bahwa berdasarkan evaluasi konteks tujuan program telah relevan dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam menimalisir dampak penurunan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dari aspek input meliputi sumber daya, alokasi anggaran, perangkat desa, dan mekanisme distribusi program telah sesuai dan didukung untuk dilaksanakan sebaik mungkin. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pendataan awal penerima manfaat masih memerlukan penyempurnaan. Untuk membuat data lebih akurat dan jelas, kapasitas untuk mengelola dan mengupdatenya harus ditingkatkan. Aspek proses menyatakan bahwa sistem pendistribusian dana dilakukan sesuai jadwal dan program berjalan dengan baik, akan tetapi terdapat beberapa kendala, seperti penerima manfaat yang salah sasaran, keterlambatan dalam beberapa tahap awal, dan sedikit pengawasan masyarakat terhadap program dan hal ini menunjukkan bahwa diperlukan perbaikan pada mekanisme pemantauan dan evaluasi secara teratur serta pelibatan masyarakat dalam monitoring. Aspek evaluasi produk terlihat bahwa program BLT-DD memberikan dampak positif bagi penerima manfaat sebagaimana meningkatkan daya beli, pemenuhan kebutuhan dasar dan penurunan angka beban ekonomi rumah tangga, kendati demikian untuk manfaat jangka panjang masih belum berjalan sepenuhnya perlu untuk dikaji ulang oleh pemangku kebijakan sehingga penting dilakukan integrasi dengan program lainnya yang sejenis dan bersifat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Saran

Untuk kedepannya terdapat beberapa hal yang patut diperhatikan dalam pelaksanaan Program BLT-DD diantaranya yakni terkait dengan pemutakhiran data penerima manfaat secara berkala, meningkatkan sistem pengawasan guna penyaluran bantuan yang diberikan tepat sasaran, serta mengintegrasikan program dengan inisiatif Pemberdayaan ekonomi masyarakat agar terciptanya dampak yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad W. (2024). Direct cash assistance: is a solution or a new problem of poverty. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol 2 No 1*(Maret), 1–8.
- Adhania, I., Priyanto, H., & Hentika, N. P. (2023). Analisis Pada Upaya Pengentasan Masyarakat Miskin Melalui Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Pesucen Kabupaten Banyuwangi. *Nusantara Hasana Journal, 3*(3), 132–137.
- Arumdani, N., Rahmania, S. N., Nafi'ah, Z., & Tukiman. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupatensidoarjo. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2*(5), 874–885.
- Aseh, S., Gafar, T. F., & Zamhasari, Z. (2021). Problematika Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2020. *JOELS: Journal of Election and Leadership, 2*(1), 30–40. <https://doi.org/10.31849/joels.v2i1.7661>
- Asian Development Bank. (2021). Social Protection and Labor. Diakses 9 Januari 2025 pada <https://www.adb.org/what-we-do/themes/social-development/overview/social-protection-labor>
- Bappenas. (2019). Meningkatkan Akses terhadap Program Perlindungan Sosial. Diakses 10

- Oktober 2024 pada <https://mampu.bappenas.go.id/tema/akses-kepada-perlindungan-sosial/>
- Habibullah. (2017). Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia. *Sosio Informa*, 3(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.492>
- Hadi, N., Anjasmari, N. Made M., & Noorrahman, M.F. (2025). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Desa Sungai Kuini dan Banyu Tajun Hilir). *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(1), 90-102
- Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan Implementation of Village Fund Direct Cash Assistance Policy for Villagers Affected by COVID-19 in Sumedang Regenc. *Jurnal Inspirasi*, 12(1), 1-16.
- Ispa, Yopi A., Prihatiningsih, A., & Marlina, T. (2025). Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 9(1), 135-148.
- Kementerian Desa, P. D. T. dan T. (2020). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai BLT Dana Desa. In *KOMPAK*.
- Kurniawan, A. (2020). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Untuk Menangani Dampak Pandemi Covid-19: Cerita Dari Desa. In *Smeru Research Intitute* (Issue 4). <https://smeru.or.id/id/file/2844/download?token=UMNriXB0>
- Maryam, S., & Cahyani, H. R. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pulung Rejo. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 50-72.
- Maspawati Maspawati, Bakri Bakri, & Afdal Afdal. (2023). Pengaruh Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. *Journal of Administrative and Social Science*, 4(2), 82-96. <https://doi.org/10.55606/jass.v4i2.351>
- Mulyadi, S. (2022). Penyaluran BLT Desa Dibandingkan dengan Angka Kemiskinan. Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Diakses 12 Oktober 2024 pada <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3861-penyaluran-blt-desa-dibandingkan-dengan-angka-kemiskinan.html>
- Rama, A., Ambiyar, A., Rizal, F., Jalinus, N., Waskito, W., & Wulansari, R. E. (2023). Konsep model evaluasi context, input, process dan product (CIPP) di sekolah menengah kejuruan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 8(1), 82. <https://doi.org/10.29210/30032976000>
- Rizki, M. (2021). Dampak Program Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Good Governance*, 17(2), 125-135. <https://doi.org/10.32834/gg.v17i2.335>
- Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi di Desa. *Indonesia Treasury Review: Jurnal Pervebdaraan, Keuangan Negara, Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247-262.
- Stufflebeam, D.L. & Shinkfield, A.J. (1985). Systematic evaluation: as elf-instructional guide to theory and practice. Kluwer-Nijhoff Publishing
- Subhan, R., Junaidy, J., & Merdayanty, D. (2023). The effectiveness of direct cash assistance of village funds on community welfare in Martapura district, Banjar district, South Kalimantan. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(3), 1756-1762. <https://jurnal.usk.ac.id/riwayat/article/view/34167%0Ahttps://jurnal.usk.ac.id/riwayat/article/download/34167/18913>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2013). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2020). Ringkasan kebijakan pengutamakan penggunaan dana desa. In *Unit Riset Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*.
- Triana, E., Rahman, A., & Fatih, H. M. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan

Dita Mayreista, Eka Nurwahyuliningsih, Mutiara Rizki

Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kecamatan Benakat Kabupaten Muaraenim Vol 7 No 1 Tahun 2025, p 59-71

Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Murutuwu Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis (S4)*, 9(2), 134–145.
<http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jieb>

Ulumudin, A., Triana, Y., Mulyaningsih, M., & Akbar, G. G. (2022). The Effectiveness of Direct Cash Village Fund Program in 2021. *Journal of Governance*, 7(4).
<https://doi.org/10.31506/jog.v7i4.17665>